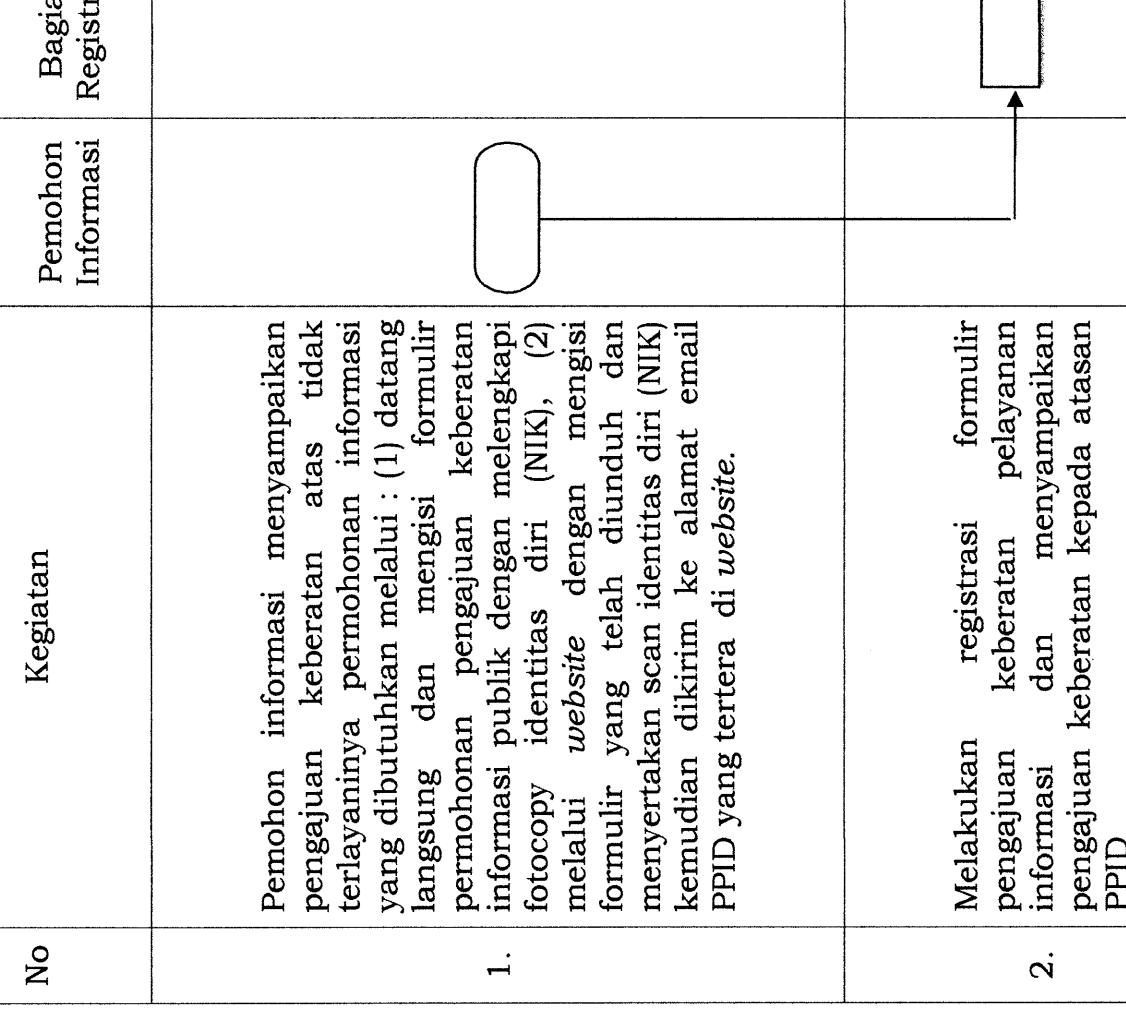


		PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN GUNUNG MAS	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK	DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;	KETERKAITAN : Standar Operasional Prosedur tidak dilaksanakan maka dikenakan sanksi teguran/lisan atau tertulis dari atasan secara berjenjang.
		NOMOR SOP : 000.8.3.3/500/DKIPS/VII/2024 TGL. PEMBUATAN : 29 September 2020 TGL. REVISI : 18 Juli 2024 TGL. EFEKTIF :	DISAHAKAN OLEH : RUBI HARISS, S.T NOMOR UKURAN : 0830507 200604 1 017 NAMA SOP : PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK	KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Diploma dan Sarjana 2. SLTA/SMA/Sederajat 3. Mampu mengoperasikan komputer	KETEPATAN DAN PENDATAAN : - Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>
				KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN GUNUNG MAS, RUBI HARISS, S.T NOMOR UKURAN : 0830507 200604 1 017 NAMA SOP : PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK	PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja 2. CPU 3. Printer 4. Alat tulis kantor 5. Jaringan internet
					PENCATATAN DAN PENDATAAN : - Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Pemohon Informasi	Bagian Registrasi	PPID Utama Atau PPID Pelaksana	Atasan PPID	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Keluaran (Output)
	<p>Permohonan informasi menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak terlayanannya permohonan informasi yang dibutuhkan melalui : (1) datang langsung dan mengisi formulir permohonan pengajuan keberatan informasi publik dengan melengkapi fotocopy identitas diri (NIK), (2) melalui website dengan mengisi formulir yang telah diunduh dan menyertakan scan identitas diri (NIK) kemudian dikirim ke alamat email PPID yang tertera di website.</p> <p>1.</p> 					(1) formulir pengajuan keberatan informasi publik yang tersedia di meja pelayanan PPID atau ditampilkan di website dan dapat diunduh (2) fotocopy atau scan diri dari identitas (NIK) pemohon yang mengajukan keberatan	Pada hari dan jam kerja	Formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi publik yang telah disi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri
	<p>2.</p> <p>Memeriksa keberatan dari para pemohon pengajuan</p>					Daftar pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah di file dalam bentuk hardcopy dan soft copy	Pada hari dan jam kerja	Daftar surat yang harus
3.	Memeriksa keberatan dari para pemohon pengajuan					Berkas pengajuan	Pada hari	

	informasi dan memerintahkan PPID Utama dan PPID Pelaksana untuk menjawab permohonan informasi				
	keberatan pelayanan informasi yang telah lengkap	dan jam kerja	diberikan kepada PPID Utama dan PPID Pelaksana	Surat perintah tertulis kepada PPID Utama dan PPID Pelaksana untuk memenuhi permintaan pemohon informasi yang mengajukan keberatan pelayanan informasi publik	
4.	Memerintahkan kepada PPID Utama dan PPID Pelaksana untuk memenuhi permintaan informasi pemohon informasi	(1)berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah lengkap, (2) DIP yang telah diumumkan	Pada hari dan jam kerja yang diisi	Dokumen / informasi yang dimaksud oleh pemohon yang dimaksud oleh pemohon informasi atau rekomendasi surat penolakan	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan
5.	Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi kepada atasan PPID jika informasi yang dimaksud telah masuk DIP. Atasan PPID akan menjawab pengajuan keberatan kepada pemohon informasi, jika informasi yang diinginkan pemohon informasi tidak termasuk dalam DIP yang telah diumumkan, karena informasi belum tersedia atau termasuk informasi yang dikecualikan maka diberikan surat penolakan kepada pemohon informasi.				